



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**Balai Pendidikan dan  
Pelatihan Hukum  
Jawa Tengah**

Jl. Raja Mr. Mothohsan No.334  
Wibesi, Madi Ngapakari, Kota Semarang,  
Jawa Tengah 50158



-  [balaipehuk.com/jawatengah.go.id](http://balaipehuk.com/jawatengah.go.id)
-  [facebook.com/balaipehuk](https://www.facebook.com/balaipehuk)
-  @balaipehuk
-  Balai Pendidikan & Pelatihan
-  Balai Pendidikan & Pelatihan
-  Balai Pendidikan & Pelatihan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Perencana Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Evaluasi mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja, rencana program dan kegiatan, serta analisis terhadap keterbatasan maupun kendala yang dihadapi selama periode pelaksanaan. Penyajian data dan informasi dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi yang objektif, sehingga menjadi dasar dalam peningkatan kualitas pemerintahan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kinerja pada tahun berikutnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan beryoga sama dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga LKIP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang objektif, transparan, dan akuntabel.



Berarung, 5 Januari 2020

Sebagai,

Minto Gunawan Situmorang



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah atas Perjanjian Kinerja Lama dan Perjanjian Kinerja Baru Tahun 2023.



Capaian Perjanjian Kinerja Lama menunjukkan seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tawar-menawar, Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan di Wilayah Jawa Tengah	Tingkat kemajuan kegiatan Ekspat Hukum terhadap penyelenggaraan Data Hukum Badan-Diklat Jawa Tengah	100% (10000)	100% (10000)	100,00%
2.	Meningkatkan Resiliensi Reformasi Administrasi Lingkungan Diikat Hukum Jawa Tengah	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Administrasi di lingkungan Badan-Diklat Hukum Jawa Tengah Indikator capaian status kerja lingkungan Badan-Diklat Hukum Jawa Tengah terhadap layanan administratif	100% (10000)	100% (10000)	100,00%



Kemudian pada Projejian Kinerja Baru terdapat 5 (lima) indikator lebih rinci yang akan menjadi target yang ditetapkan, sementara 2 (dua) indikator pada skema kegiatan Mingguannya Layanan Pembinaan Hukum di Wilayah belum dapat diukur (NOT QUANTIFIABLE) dikarenakan pada saat ini kebijakan di bidang hukum Sala Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sedang dalam tahap penemuan.

No	Isi dari Kegiatan (WI)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKG)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penguasaan Materi dan Kompetensi di Bidang Pelayanan dan Pembinaan Hukum	Pemertanian Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Hukum	100%	100%	100%
		Indikasi kepuasan Unit Kerja Lingkup Desa Pendidikan dan Pelatihan Hukum terhadap Layanan Kasejahteraan	3,32	3,00	101,23%
2.	Meningkatnya Layanan Pembinaan Hukum di Wilayah	Tingkat kepuasan Layanan Pembinaan Hukum di Kota, Di luar wilayah terhadap standar Pelayanan	0	1	MA
		Tingkat kepuasan Peserta Pembinaan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Sala Desa Hukum	0	1	MA
3.	Meningkatnya Layanan Pembinaan Hukum di Wilayah	Pemertanian peserta yang lulus pelatihan terhadap total peserta pada tahun A201	55%	100%	101,23%



Dari sisi anggaran, pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah pada Tahun 2025 sebesar Rp 25.335.575.000. Dari nilai tersebut terdapat dana yang tidak dapat digunakan (tidak) akibat kebijakan penyusutan belanja negara (sharink) sebesar Rp 15.654.256.000 sehingga jumlah pagu yang tersedia dan dapat dipergunakan adalah Rp 9.681.319.000. Dari nilai pagu efektif tersebut telah terakumulasi sebesar Rp 4.561.333.215 atau 46,1%.

Kategori	Pagu Non Efektif			Pagu Efektif		
	Pagu	Belanja	Cupang	Pagu	Belanja	Cupang
Layanan Pendidikan Manajemen Internal	8.232.351.000	8.232.351.000	0,00%	8.232.351.000	8.232.351.000	100,00%
Layanan Penyelenggaraan Internal	4.981.000.000	24.740.000	0,49%	244.260.000	227.260.000	92,99%
Layanan Manajemen SDM Internal	13.112.224.000	2.252.875.000	17,18%	2.746.699.000	2.746.699.000	100,00%
Layanan Manajemen Ruang Internal	904.234.000	222.348.786	24,59%	296.765.214	222.348.786	74,72%
<b>Jumlah</b>	<b>27.230.809.000</b>	<b>1.331.265.266</b>	<b>4,89%</b>	<b>11.520.074.214</b>	<b>11.520.074.214</b>	<b>100,00%</b>



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ISI	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Sumber Daya Manusia	6
D. Misi dan Tujuan	10
E. Aspek Strategis Dalam Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jasa Tengah	11
F. Ibu Strategis Dalam Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jasa Tengah	12
G. Sistem Kerja Layanan	14
BAB II PEMERIKSAAN KOPERASI	17
A. Rambu-rambu Strategis	18
B. Manajemen Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KOPERASI	21
A. Catatan Kinerja Departemen	22
B. Rencana Kinerja	25
C. Catatan Kinerja Anggaran	46
D. Catatan Kinerja Lainnya	87
BAB IV PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran	75
LAMPIRAN	74



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah ASN di Wilayah Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6
Grafik 2. Jumlah Pegawai Berkebutuhan Khusus	7
Grafik 3. Tingkat Pendidikan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	8
Grafik 4. Perkembangan Pegawai dan Realisasi Tahun 2024 dan 2025	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah ASN di Wilayah Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6
Tabel 2. Suku dan Etnis Pegawai Berkebutuhan Khusus	18
Tabel 3. Pendidikan Pegawai Lama	18
Tabel 4. Pegawai Berkebutuhan Khusus	23
Tabel 5. Realisasi Pegawai Berkebutuhan Khusus	23
Tabel 6. Capaian Target Realisasi Pegawai Berkebutuhan Khusus	24
Tabel 7. Rencana Realisasi Pegawai Berkebutuhan Khusus 2025	30
Tabel 8. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	34
Tabel 9. Realisasi Pegawai Berkebutuhan Khusus	38
Tabel 10. Rencana Anggaran Realisasi Pegawai Berkebutuhan Khusus	40
Tabel 11. Jumlah Pegawai Berkebutuhan Khusus Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 12. Output Pelatihan Tahun 2025	57
Tabel 13. Rencana Anggaran per Tanggal 31 Desember 2025	60
Tabel 14. Realisasi Anggaran per Tanggal 31 Desember 2025	61
Tabel 15. Perkembangan Pegawai Berkebutuhan Khusus Tahun 2024 dan 2025	63
Tabel 16. Realisasi Anggaran yang Telah Dipecahkan	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sebaran Wilayah Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3
Gambar 2. Struktur Organisasi	7
Gambar 3. BSMIT DPK	30
Gambar 4. KPI	38
Gambar 5. G. Performance	47
Gambar 6. G. Kinerja Berkebutuhan Khusus	57
Gambar 7. Realisasi Anggaran Pegawai Berkebutuhan Khusus	68
Gambar 8. Realisasi Anggaran Pegawai Berkebutuhan Khusus	68

A vintage brass compass with a circular dial and a ring handle is positioned on a piece of aged, yellowed paper that appears to be a map. The compass is the central focus, with its intricate details and the texture of the map visible. A semi-transparent white banner is overlaid across the middle of the image, containing the text.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

**B**alai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dari HAM Jawa Tengah dibentuk pada tanggal 30 Mei 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya akan diuraikan secara lebih lanjut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Fungsional Sertifikasi Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Fungsional Sertifikasi Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Kepala Divisi Administrasi.

Dalam era pemerintahan Prabowo-Gibran dibuktikan instrumentalitas Kementerian pada Garis Misi Puluh untuk memfasilitasi tercapainya target, upaya dan pencapaian program-program Kementerian sesuai visi pemerintahan saat ini. Kementerian Hukum dan HAM bertransformasi menjadi 3 (tiga) kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Inspeksi dan Penegakan, Rekrutasi dan Inspeksi yang melibatkan perubahan menterdi di jajaran Kementerian Hukum, termasuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah.

## B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan amanah, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah masih terdistribusi pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah, yakni provinsi Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Gambar 1. Wilayah Wilayah Kerja Balai Pendidikan Hukum Jawa Tengah



Dari seluruh wilayah kerja tersebut terdapat 13 (tiga belas) satuan kerja di wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dengan jumlah SDY Aparatur sebanyak 1.408 orang dengan rincian sebagai berikut.

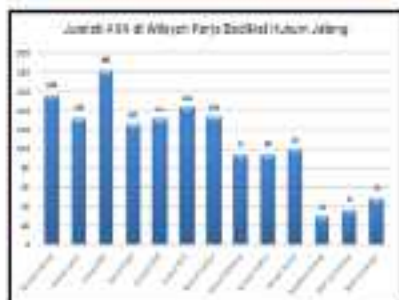


Tabel 1. Jumlah ASN di wilayah Kerja Kesehatan rumah Jawa Tengah

No	Wilayah Kerja	ASN			Jumlah
		PPS	CPG	PKPA	
1	Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan Jawa Tengah	121	19	14	154
2	Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan Jawa Timur	58	20	14	102
3	Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan D.I.Yogyakarta	147	13	15	185
4	Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan Bali	55	12	12	120
5	Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan Nusa Tenggara Barat	100	14	12	136
6	Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan Nusa Tenggara Timur	83	13	20	143
7	Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan Kalimantan Barat	113	16	4	133
8	Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan Kalimantan Tengah	75	12	7	94
9	Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur	77	16	2	95
10	Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan Kalimantan Selatan	82	16	1	99
11	Kepolisian Hukum Jawa Tengah	10	6	13	39
12	Balai Haris Peringatan Gahamog	22	13	2	37
13	Balai Haris Peringatan Suroboyo	12	6	2	20
<b>Total seluruhnya</b>		<b>1.274</b>	<b>175</b>	<b>107</b>	<b>1.456</b>

Sumber: data yang diperoleh dari Ditjen Ditjen

Tabel 1. Jumlah ASN di Wilayah Kerja Kesehatan rumah Jawa Tengah





Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. pelaksanaan urusan teknis usaha dan rumah tangga Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.



### Diagram of a Cell (Eukaryote)

Diagram of a Cell (Eukaryote)



### C. Sumber Daya Manusia



**B**alai Pendidikan dan Pelatihan Human Jawa Tangga dipimpin oleh Kepala Balai Diklat yang dibantu oleh 5 (lima) Pejabat Pembesertaan dan didukung oleh Pejabat Fungsional (JFT), Pejabat Kona (JKU) dan PPPK.

Jabatan	Jumlah
Daslin III	1 orang
Daslin IV	3 orang
JFT	4 orang
JKU	12 orang
PPPK	10 orang
<b>Total</b>	<b>30 orang</b>

Perincian kupa dan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Human Jawa Tangga terdapat sebagai berikut:

#### 1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha membantu kupa melakukan pengabdian urusan kepegawaian, keuangan, urusan, perlengkapan, urusan umum, tata persurutan, tata korespondensi, perencanaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitas rekaman elektronik, perlengkapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyediaan sarana akomodasi kepegawaian dan



kegiatan belajar milik negara, dan pengelolaan pemerintahan negara tidak sebaik, serta urusan rumah tangga Duta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## 2. Sekeloa Program dan Evaluasi

Sekeloa Program dan Evaluasi mempunyai tugas penjabaran dan pemantauan rencana program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di wilayah.

## 3. Sekeloa Penyelenggaraan

Sekeloa Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyusutan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.



Grafik 2. Jumlah Pegawai Eselon II dan Eselon III



Grafik 3. Tingkat Pendidikan Pegawai Eselon II dan Eselon III

#### D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKJP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah selama Tahun 2025 sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja. LKJP ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, efektivitas program dan kegiatan, serta penggunaan sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Adapun tujuan penyusunan LKJP ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terakumulasi kepada pemangku jabatan serta kinerja yang telah dicapai oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah.
2. Mendukung Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya pertukaran pembelajaran dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kesempatan kepada **Stakeholder** terhadap Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja.
5. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah pada tahun yang akan datang.

## E. Aspek Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah

Tugas yang diberikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam menyempurnakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi SDM yang sangat strategis dalam mengembangkan kompetensi SDM. Aspek strategi tersebut sejalan dengan penyusunan kerangka regulasi dan kelembagaan yang menjadikan Urgi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan, rencana, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
- 2) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
- 3) Pelaksanaan standarisasi sertifikasi, akreditasi dan sistem pengendalian mutu kompetensi SDM di bidang hukum dalam skema Corporate University;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
- 5) Pelaksanaan administrasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPSDM Hukum.



## F. Isu Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah

Dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah tentu akan selalu dihadapkan pada keterbatasan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan perencanaan belajar dan sumber, sehingga program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam konteks internal kelembagaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sendiri terdapat beberapa isu strategis yang sudah selanjutnya mendorong kondisionalnya kapasitas dan kinerja yang dimiliki oleh organisasi dalam upaya pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada sisi sumber daya manusia dan organisasi, belum terpekaanya pada kompetensi yang dicarinya dengan analisis jabatan dan bahwa kerja telah memiliki kondisi yang cukup baik, sehingga mengakibatkan:

- Banyak kerja yang belum merata
- Kompetensi pegawai yang belum merata
- Peningkatan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensi

Di samping hal tersebut, banyak pula beberapa kompetensi yang masih sangat membutuhkan upaya peningkatan lebih lanjut, seperti Teknologi Informasi. Contoh Program Pembinaan (penguatan) kurikulum dan metode pembelajaran, Manajemen Penyelenggaraan Program Pelatihan, serta kebutuhan akan peningkatan SDM dan budaya kerja profesional. Berbagai hal tersebut pada selanjutnya telah memiliki permasalahan kerja organisasi yang belum optimal, serta tidak terbatareanya berbagai program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi dengan metodologi yang mutakhir.

Dalam hal metodologi pembelajaran sendiri, telah dimilikinya program pembelajaran berbasis *Learning*, serta keabsorban instruksi satuan pembelajaran dan para peserta (meliputi sudah memulainya upaya



penelitian agar memberikan hasil yang maksimal, tidak hanya saja keutusan Bala Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yang mendorong pengikutian jurisdiksi pegawai yang mendapatkan program pengembangan kompetensi, serta dapat terlaksananya pengikutian kompetensi peserta pelatihan dan kualitas penyelenggaraan pelatihan.

Namun demikian, dalam hal metode ini para dibuktikan indikator bahwa masih belum terjadi kesesuaian antara metode pembelajaran dengan kebutuhan pegawai Kementerian Hukum serta alokasi anggaran. Hal ini perlu diteliti akan berdampak pada:

1. Kualitas program pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Hukum yang belum maksimal;
2. Belum melaksanakannya pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Hukum berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 dan PP 17 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan ASN

Bala Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah memiliki inovasi yang digunakan untuk menunjang kinerja diantaranya:

- **ELC (E-Learning Center)** yang merupakan portal pembelajaran mandiri milik Bala Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah;
- **Si KAD** merupakan rencana aksi yang dibuat peserta pelatihan sebagai bentuk implementasi hasil pelatihan di tempat kerja sebagai wujud dasar perilaku keahliantahuan pelatihan dan keberlanjutan pasca pelatihan;
- **Pelatihan di Wilayah Kerja (PDMK)** adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh Bala Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah berdasarkan zona wilayah yang akan dibagikan oleh Kepala Bala Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah

### G. Sistematika Laporan

**L**aporan kinerja keuangan Pemerintah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bagian I – Pendahuluan**, memaparkan informasi mengenai:

- A. Latar belakang;
- B. Tujuan, fungsi dan struktur organisasi;
- C. Sumber daya manusia;
- D. Misi dan tujuan;
- E. Arah strategi Badan Pendidikan dan Pelatihan Negeri Jawa Tengah;
- F. Kebijakan strategi Badan Pendidikan dan Pelatihan Negeri Jawa Tengah, serta
- G. Sistematika laporan.

**Bagian II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan ringkasan mengenai perencanaan kinerja yang meliputi:

- A. Rencana strategis, dan
- B. Pelebaran kinerja.

**Bagian III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan ringkasan mengenai pengukuran kinerja dan realisasi anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Negeri Jawa Tengah Tahun 2025 yang mencakup:

- A. Capaian kinerja organisasi;
- B. Realisasi anggaran;
- C. Capaian kinerja anggaran, serta
- D. Capaian kinerja kinerja.

**Bagian IV – Penutup**, menyajikan ringkasan mengenai laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Tahun 2025 yang ditunjukkan dalam:

- A. Simulasi, dan
- B. Soal.

Langganan

A fountain pen and a pen holder are shown on a wooden surface. The pen is silver and has a decorative, ornate design. The pen holder is also silver and has a similar ornate design. The background is a dark, textured surface. A semi-transparent white box is overlaid on the image, containing the text "BAB II PERENCANAAN KINERJA".

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**



## A. Rencana Strategis

**R**encana Strategis (Rencana) merupakan dokumen perencanaan yang menguraikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pemerintahan. Dokumen ini ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan untuk memandu upaya pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan visi Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu **"Berkeadilan Indonesia Maju Berkeadilan Indonesia Cemas Tahun 2045"**. Untuk mendukung pencapaian visi Presiden, Kementerian Hukum berupaya strategi dalam memajukan pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan yang rangkai yaitu **Asa Cita Presiden khususnya Prioritas Nasional (PN) 7: yaitu "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan"**. Alinea dasar itu, termasuk visi Kementerian Hukum untuk tahun 2025-2029 adalah:

**Terwujudnya Supremasi Hukum dalam Mendapatkan Stabilitas Ekonomi  
dan Pembangunan Nasional  
dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju  
Maju Indonesia Cemas Tahun 2045**

Adapun **misal** Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 adalah:

1. Mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih;

Berdasarkan visi Kementerian Hukum, maka **tujuan** Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan pembangunan hukum;
2. Meningkatkan kualitas implementasi RB Kementerian Hukum;



Wali Diklat Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah merencanakan gambaran kondisi ideal yang terdapat pada periode 2025-2029 yang selaras dalam mendukung terwujudnya visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, yaitu:

---

*Wali pengembangan dan peningkatan talenta dalam menghasilkan SDM  
hukum yang produktif, kompeten dan profesional  
dalam melayani*

*Tercapainya sumberdaya hukum dalam melaksanakan stabilitas nasional  
dan seluruh tujuan ekonomi nasional dalam rangka pembangunan  
Negeri yang maju pada tahun Indonesia Emas tahun 2045*

---

Misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah selaras dengan Visi BPSDM Hukum 2025-2029 yaitu:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kompetensi bidang hukum yang berkualitas, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan SDM bidang hukum;
2. Mewujudkan tata kelola organisasi BPSDM Hukum yang swasembada dan profesional.

Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah selaras dengan tujuan tugas dari BPSDM Hukum antara lain:

1. Terwujudnya BPSDM Hukum sebagai *Corporate Identity*;
2. Terwujudnya tata kelola BPSDM Hukum yang swasembada dan profesional.



Setelah diluluskannya Rencana Kemandirian Hukum 2025-2026 sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025, maka terdapat perubahan sasaran dan indikator kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah. Pada Rencana ini terdapat 3 Sasaran Kegiatan (SK) dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut pada tabel berikut.

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Jawa Tengah 2025-2026

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
IK.1	Meningkatnya Penguasaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum	IKK 1.1 Persentase Penguasaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum IKK 1.2 Indeks Kepuasan (IK) Peta Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum terhadap Layanan Kelembagaan
IK.2	Meningkatnya Layanan Pelatihan Hukum di Wilayah	IKK 2.1 Tingkat Kepuasan Layanan Pelatihan Hukum di Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum terhadap Monev Pelayanan IKK 2.2 Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Hukum di Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum
IK.3	Meningkatnya Layanan Pelatihan AikK Kemandirian Hukum di Wilayah	IKK 3.1 Persentase peserta yang lulus pelatihan kemandirian hukum sebagai penerapan AikK Kemandirian Hukum di Wilayah



## B. Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025 terdapat 2 (dua) Perjanjian Kinerja Sala Pendidikan dan Kesehatan Hukum Jawa Tengah, yaitu Perjanjian Kinerja Lama yang diluar pada periode Januari sampai dengan Oktober 2025 dan Perjanjian Kinerja Baru yang diluar pada periode November sampai dengan Desember 2025.

### 1) Perjanjian Kinerja Lama

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Lama

No	Isi Pokok Kegiatan (IK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKG)	Tingkat
1	Tercapainya Pelaksanaan Pembentukan dan Penguatan Hukum di Wilayah Jawa Tengah	Tingkat capaian persentase di bidang Hukum (kegiatan penyempurnaan) Direktorat Hukum Badan Diklat Jawa Tengah	50% (100%)
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Diklat Hukum Jawa Tengah	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Diklat Hukum Jawa Tengah Indikator kegiatan reformasi birokrasi Badan Diklat Hukum Jawa Tengah meliputi: layanan keadministrasian	100% 5:1 (100%)

No	Kegiatan	Anggaran
<b>Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Aparatur di Wilayah</b>		<b>Rp. 26.285.474.808</b>
1	Layanan Di Bidang Manajemen Internal	Rp. 5.444.621.808
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 4.281.610.000
3	Layanan Manajemen Sistem Informasi	Rp. 13.281.372.000
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 3.277.871.000



## 2) Perjanjian Kinerja Baru

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Baru

No	Isi dari Kegiatan (IK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target
1	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Hukum	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Hukum	100%
		Indikator Kapasitas Unit Kerja Utama Jasa Pendidikan dan Pelatihan Hukum terhadap Layanan Administrasi	1,3%
2	Meningkatkan Layanan Pelatihan Hukum di Wilayah	Triptik Kebutuhan Layanan Pelatihan Hukum di Bidang Hukum terhadap Standar Pelayanan	1
		Triptik Kebutuhan Peserta Pelatihan Hukum terhadap Perwujudan Pelatihan Hukum Bagi Dirjen Hukum	1
3	Meningkatkan Layanan Pelatihan di 56 Kementerian Hukum di Wilayah	Persentase peserta yang lulus pelatihan terhadap total peserta pelatihan di 56 Kementerian Hukum di Wilayah	99%

No	Kegiatan	Anggaran
<b>Penyenggaraan Pelatihan aparatur di wilayah</b>		<b>Rp. 16.281.476.808</b>
1.	Layanan E-Learning Manajemen Personal	Rp. 5.722.151.308
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Informatika	Rp. 6.983.833.308
3.	Layanan Manajemen Sistem Informatika	Rp. 13.010.500.308
4.	Layanan Manajemen Kinerja Informatika	Rp. 084.434.308

A still life illustration of a study desk. In the background, several books are stacked. In the foreground, a quill pen is held in a holder, and a lit candle sits in a wooden holder. An open book with text is visible on the desk. The scene is lit with warm, low-key lighting, creating a scholarly atmosphere.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**





## SAYURAN KEGIATAN (SK) 1

Tujuan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum di Wilayah Jawa Tengah

1.1.1. Tingkat Kepuasan Peserta Didik Hukum terhadap Penyelenggaraan Didik Hukum Bagi Didik Jawa Tengah

### a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Tingkat kepuasan peserta Didik Hukum serta dan penyelenggaraan Didik Hukum Bagi Didik Jawa Tengah	3,5	3,7	106,30%	Tercapai

Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan yang diberikan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah pada tahun berjalan. Program pelatihan dirancang untuk membantu peserta pelatihan dapat memusnahkan peserta didik yang akhirnya timbul resiko yang menyebarkan dan polutan. Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan diukur berdasarkan parameter tingkat pengapian, resiko dan penyelenggaraan pelatihan.

Kepuasan terhadap penyelenggaraan pelatihan diukur melalui survei dengan kuisioner dengan 5 (lima) skala penilaian (skala Likert). Hasil survei kemudian diolah dan dikategorikan sesuai kualifikasi penilaian sebagai berikut:

Skala	Penilaian	Nilai	Kualifikasi
5	Sangat Baik	81,01 – 100	Sangat Memuaskan
4	Baik	66,01 – 80	Memuaskan
3	Cukup	51,01 – 65	Cukup Memuaskan
2	Tidak Baik	36,01 – 50	Rendah Memuaskan
1	Sangat Tidak Baik	0-35	Tidak Memuaskan



Berikut Pendidikan dan Pendidikan Ekonomi Jarak Jauh Tengah tidak melaksanakan evaluasi pada pelatihan dan webinar yang sudah selesai kegiatan. Berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana disajikan pada tabel berikut, seluruh penyelenggaraan kegiatan DOKSI pada kegiatan "Jelang Merdeka Belajar" ini merupakan indikator kuat bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kriteria layanan berkualitas layanan pengguna layanan.

Tabel 8. Capaian Target Kegiatan Peserta Pendidikan

Pelatihan	Mula Pelaksanaan	Mekanisme	Durasi	Capaian		
				Target	Realisasi	Persentase
Pelatihan GMP Terpadu	21 - 25 April 2020	Online	40	34,00	85,00	94,00
Pelatihan Manajemen Risiko Kegiatan Sekolah Negeri	14 - 20 Mei 2020	PJM	30	30,00	30,00	90,00
Webinar Series "Memahami Budaya Kita Kelainan" Model Kolaborasi di Era Digital	21 Mei 2020	Webinar	300	30,00	30,00	90,00
Pelatihan Insentif Komunikasi	17 - 20 Juni 2020	PJM	40	35,40	34,00	94,00
Pelatihan Public Speaking	1 - 3 Juli 2020	PJM	40	30,00	30,00	90,00
Webinar Series "Perencanaan Model Pengembangan Kurikulum"	02 Agustus 2020	Webinar	1.504	30,00	30,00	94,00
Workshop Prosedur	11 - 19 September 2020	Workshop Learning	30	30,00	30,00	90,00
<b>Jumlah</b>				<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Target Kegiatan Peserta (Dialokasikan)</b>				<b>1.000</b>		
				<b>1,00</b>		

#### Formulasi penganggaran

Tipe Kegiatan (Dialokasikan)		Uraian	Uraian	Uraian
1. Kegiatan Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan Kegiatan	1. Penyelenggaraan Kegiatan	1. Penyelenggaraan Kegiatan	1. Penyelenggaraan Kegiatan
		2. Penyelenggaraan Kegiatan	2. Penyelenggaraan Kegiatan	2. Penyelenggaraan Kegiatan
		3. Penyelenggaraan Kegiatan	3. Penyelenggaraan Kegiatan	3. Penyelenggaraan Kegiatan

#### Realisasi Budget kegiatan peserta

Target kegiatan peserta (Dialokasikan)	1.000 (Indeks)
--	----------------



Adapun capaian tingkat kepuasan peserta :

$$= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,87}{3,8} \times 100\% = 101,89\%$$

#### d) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepuasan peserta Diak. Tahunan terhadap penyelenggaraan Diak. Hutan Kota Diak. Jawa Tengah	3,8	3,87	101,89%	3,8	3,87	101,89%

Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan realisasi dan capaian tingkat kepuasan peserta diak pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Dengan target yang sama, realisasi tahun 2024 sebesar 3,87 dengan capaian 101,89% dan realisasi tahun 2025 sebesar 3,87 dengan capaian 101,89%. Hal ini menunjukkan kualitas penyelenggaraan diak Kota Pendidikan dan Pelatihan Hutan Kota Jawa Tengah semakin meningkat dan telah baik dibandingkan tahun sebelumnya.

#### e) Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Rencana

Substrategi	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat kepuasan peserta Diak. Tahunan terhadap penyelenggaraan Diak. Hutan Kota Diak. Jawa Tengah	3,8	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,8	3,87	3,8	3,87



Dasar legal di sisi lain adalah bahwa target jangka menengah adalah rangkaian peningkatan nilai tahun 2020 sampai dengan 2025. Namun selubung dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah atau Pemerintahan No.1 Tahun 2024 dan Peraturan Nomor 42 Tahun 2025, tahun target tahun 2024 dan 2025 tersebut menjadi tidak. Akibat dilakukannya perubahan antara rencana target jangka menengah pada Rencana, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah secara umum yaitu menjadi target yang ditetapkan

#### d) Perencanaan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini akan menjadi perubahan standar nasional.

#### e) Analisa Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dipengaruhi oleh:

- Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian yang dibuktikan oleh paparan untuk mendukung peningkatan kinerja mereka
- Para Widyawana yang diadatkan merupakan paparan yang komprehensif dan ada di lingkungan
- Motivasi dan tenaga kerja yang disediakan memiliki dan mudah dipantau
- Para peserta penyelenggara akan dalam mendapatkan informasi dan pendampingan selama pelatihan berlangsung, baik secara langsung maupun melalui whatsapp group
- Terdapat kolaborasi antar instansi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah melakukan berbagai kegiatan (program pelatihan dengan):
  - 1) Fasilitas, Pengawasan SPKP untuk penyelenggaraan Pelatihan SPK Terintegrasi dan Pelatihan Manajemen Risiko
  - 2) Kolaborasi program pengembangan kompetensi ASN di bidang hukum di lingkungan Pemerintah Daerah di antaranya Pemerintah Provinsi Bali



Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa  
Tengah.

#### f) **Analisis Efisiensi/Penggunaan Sumber Daya**

- Dengan jumlah SDM yang terbatas yaitu 20 pegawai, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah memaksimalkan kapasitas sebagai lembaga dan pegawai sesuai kompetensinya. Seluruh tugas-tugas telah selesai serta dalam hal pelaksanaan pemerintahan, serta layanan peserta sesuai dengan maupun Lemig hingga penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan.
- Dalam hal keterbatasan jumlah Widyaiswara, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah mengoptimalkan para pegawai dan BPSCM Hukam, Unit Pusat maupun dan Instansi lain yang kapabel dan relevan untuk memenuhi kebutuhan lembaga sebagai.
- Selubungannya dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, beberapa pelatihan yang semula dilaksanakan klasikal telah dialihkan menjadi PJJ ( daring) guna terlaksananya pelatihan tanpa mengurangi esensi dan kebermampuan peserta.

#### g) **Analisis Riset/penyempurnaan Keefektifan**

Kegiatan utama yang berkaitan dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yaitu:

- adanya koordinasi dengan BPSCM Hukam dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan;
- melakukan survei kepuasan masyarakat berupa Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Masyarakat Pelayanan (SPMP) yang dilaksanakan sebagai bahan masukan pengguna layanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah (hasil survei terlampir). Survei ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi agar dapat meningkatkan persepsi layanan yang semakin baik.



#### A) Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi dan dampaknya di perusahaan ini. Terdapat risiko tersebut telah dilakukan beberapa tindak pengendalian sebagaimana terangkai dalam tabel berikut.

No	Potensi Risiko	Tingkat Risiko	Tindak Pengendalian Risiko
1	Peserta Pelatihan melakukan pelanggaran etik/mendapatkan nilai rendah yang signifikan.	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan pertemuan berkala untuk Penyerahan belajar dan kuis untuk menilai hasil pembelajaran peserta dan untuk pengamatan program pelatihan.</li> <li>Membuat rangkai kehuat pelatihan di kelas dengan tingkat pengulian evaluasi sesuai tingkat kesulitan yang berbeda.</li> </ul>
2	Pembuatan nilai sesuai peserta pelatihan yang akurat.	Tinggi	Mengembangkan prosedur operasi prosedur untuk penilaian pengamatan sesuai dengan standar yang ada, terapan di.
3	Terdapatnya pelanggaran serta pelanggaran lainnya.	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi tentang masalah etik yang berkaitan dengan Hukum Jasa. Terapan baik secara langsung melalui kuis.</li> <li>Melakukan tindak lanjut pengamatan dan pengamatan lainnya.</li> </ul>
4	Widyaiswara yang tidak sesuai dengan kualifikasi sebagai pengajar.	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat standar pendalaman di Widyaiswara.</li> <li>Mengembangkan standar prosedur operasional prosedur di bidang Widyaiswara. Terapan secara terapan yang terapan terapan.</li> </ul>
5	Kefektifan anggaran dalam penyelenggaraan pelatihan.	Sedang	Menyusun perencanaan anggaran pelatihan dengan memonitor terapan efektifitas dan efisiensi.
6	Kefektifan pelaksanaan pelatihan.	Sedang	Menyusun dan melaksanakan prosedur penyelenggaraan pelatihan dan monitoring hasil terapan Kefektifan D.C sebagai terapan pendalaman.



			dan pembangunan yang sejalan di Kecamatan Mungwi
1	Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul	Seorang	Menyampaikan laporan mengenai kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan melakukan pemeriksaan dan hasil penelitian yang akan diteliti dan anggarannya melalui dana DIPA

Sumber: Dokumen Penelitian Riset dan Penelitian dan Penelitian Masyarakat Kesehatan



## SAYURAN KEGIATAN (SK) 2

### Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Balai Diklat Hukum Jawa Tengah

(SK 2.1 : Persepsi Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Balai Diklat Hukum Jawa Tengah)

#### a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Pemenuhan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	100%	100%	100%	Tercapai

Indikator ini menggambarkan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah.

Pada periode 301 hingga 305 tahun 2025 terdapat 100 rencana aksi RB dimana seluruhnya telah terlaksana dan semuanya sebagaimana telah direvisi oleh Direktorat Jenderal Kependidikan Hukum.

Tabel 1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi s.d. Tahun 2025

Periode	Total Rencana RB	Rencana RB terlaksana
Tahun 1	40	40
Tahun 2	30	30
Tahun 3	30	30
Total seluruhnya	100	100

Realisasi persentase pada tahun rencana aksi RB :

$$= \frac{\text{rencana aksi rb yang terlaksana}}{\text{total rencana aksi rb}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Dari realisasi tersebut, maka capaian indikator ini juga sebesar 100%.



**b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Tujuan	Realisasi	Capaian	Tujuan	Realisasi	Capaian
Perencanaan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di tingkat Kota Salatiga Tahun Jawa Tengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dan capaian indikator ini telah tercapai 100% baik Tahun 2024 maupun Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Rencana Pelaksanaan dan Pelaksanaan Tahun Jawa Tengah konsisten dalam melaksanakan sebuah rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan baik.

**c) Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Rencana**

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Tujuan	Realisasi	Tujuan	Realisasi	Tujuan	Realisasi	Tujuan	Realisasi	Tujuan	Realisasi
Perencanaan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di tingkat Kota Salatiga Tahun Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Perencanaan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di tingkat Kota Salatiga dan Pelaksanaan Tahun Jawa Tengah baru terungkap dalam Rencana tahun 2024 dan 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**d) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.



#### e) **Analisis Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam melaksanakan target kinerja Tahun 2025 karena:

- Komitmen seluruh jajaran untuk melaksanakan rencana aksi RB.
- Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah serta para pejabat struktural lain memonitor pelaksanaan rencana aksi RB setiap bulan agar dapat dicapai tepat waktu.

#### f) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

- Dengan jumlah SDM yang terbatas, seluruh pegawai telah dimanfaatkan sebagai Tim Kerja RB dalam memenuhi data dukung rencana aksi sesuai bid dan jabatannya masing-masing.
- Digitalisasi data dukung rencana aksi dalam aplikasi CRIS untuk menunjang pelaksanaan kerja dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien.
- Pemanfaatan ruang rapat dan fasilitas internal untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi serta optimalisasi website dan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan RB.

#### g) **Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan**

Kegiatan penunjang keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yaitu adanya koordinasi dengan Kantor Wilayah EPDM Likur, serta Bina Perencanaan.

#### h) **Asesmen Risiko dan Tingkat Pengendalian Risiko**

Terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi dan mempengaruhi pencapaian ini. Terhadap risiko tersebut telah dilakukan beberapa tindak pengendalian sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.



No.	Adanya Risiko	Tingkat Risiko	Tindakan Pengendalian Risiko
1	Pemerintah dikecualikan karena ada izin tetap valid	Rendah	Melakukan monitoring terkait pemerintah serta di tetap mematuinya
2	Dalam kondisi rencana aksi yang berdampak negatif sangat minim	Rendah	Melakukan sosialisasi internal & eksternal tentang rencana aksi

Sumber: Dokumen Dokumen Risiko dan Penilaian dan Mitigasi Risiko Jura Digital



## IKK 2.2 : Indeks Kepuasan Sistem Kerja Lingkup Badan Ombud Hukum Jawa Tengah terhadap Layanan Kelembagaan

### 4) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Indeks Kepuasan Sistem Kerja Lingkup Badan Ombud Hukum Jawa Tengah terhadap Layanan Kelembagaan	9,5	9,88	103,86%	Tercapai

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan s.d.k. kerja lingkup Badan Pembinaan dan Protection Hukum Jawa Tengah terhadap layanan kelembagaan yang diberikan melalui survei bagi seluruh pegawai Badan Pembinaan dan Protection Hukum Jawa Tengah untuk memperoleh layanan kelembagaan internal.

Survei ini dilauhi dan dilakukn oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum yang berkelembagaan untuk menilai kepuasan layanan kelembagaan seluruh kerja yang meliputi layanan manajemen kinerja, kerjasama, ERM, hubungan masyarakat dan informasi, protokol, urusan, perencanaan, sarana dan prasarana, manajemen SDM, kualitas layanan kinerja, pemantauan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, manajemen hubungan kerja, penyelenggaraan kegiatan.

Pada Tahun 2025 Badan Strategi Kebijakan Hukum telah melaksanakan survei layanan kelembagaan (LJK) pada Semester I dan Semester II dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Indeks Layanan Kelembagaan

Periode	Responden	Nilai Indeks	Kategori
Semester I	28	9,88	Sangat Baik (S)
Semester II	28	9,88	Sangat Baik (S)
Rata-rata		9,88	Sangat Baik (S)

Sumber: Hasil pengukuran indeks Layanan Kelembagaan (LJK) Tahun 2025 dan BKK Hukum



Dari tabel di atas diketahui bahwa indeks Semester I sebesar 3,88 dan indeks Semester II sebesar 3,08 sehingga diperoleh indeks rata-rata sebesar 3,58 dengan kategori Sangat Baik (A). Ini menunjukkan bahwa pegawai memiliki kinerja kekegiatan yang diberikan internal sudah memuaskan standar.

Capaian indeks kepuasan layanan kekegiatan:

$$= \frac{\text{target}}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,88}{3,3} \times 100\% = 117,58\%$$

#### b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan yang meliputi Data DMI, Nilai Jasa, Target terhadap layanan kekegiatan	3,1	3,48	112,44%	3,1	3,08	128,38%

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi indeks kepuasan layanan kekegiatan Sains Pendidikan dan Penelitian Hukum Jasa Syariah tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2025 sama dengan tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa pegawai memiliki kinerja kekegiatan internal seperti seluruh pegawai telah baik dibandingkan tahun sebelumnya.



d) **Pertandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Rencana**

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks kepatuhan satuan kerja Inspeksi Badan Ombudsman Hakim Tingkat Pertama yang Terpapar terhadap Susunan Kelembagaan	-	-	-	-	-	-	0,1	0,00	0,1	0,00

Indeks kepatuhan satuan kerja Inspeksi Badan Ombudsman Hakim Tingkat Pertama terhadap susunan kelembagaan yang terungkap dalam Rencana tahun 2024 dan 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

e) **Pertandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki pertandingan standar nasional.

f) **Analisis Penyusun Kelembagaan**

Kementerian Badan Pendidikan dan Pelatihan Hakim Jawa Tengah dalam memfasilitasi target kinerja kinerja:

- Up2022 dalam memberikan informasi kapabilitas seperti ujian dasar, penyusunan (asas, prosedur, peraturan proses, variasi) paripat.
- Penyediaan capaian dan fasilitas yang mendukung pelayanan dan pelayanan publik.
- Mampu menjadi hubungan dan kerjasama dengan pihak lain sebagai 140000 untuk pelaksanaan audit reguler.
- Mampu memberikan layanan inspeksi/audit yang baik, jujur dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.
- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang tepat. Misi kerja tersebut Badan Pendidikan dan Pelatihan Hakim Jawa Tengah memperoleh pengakuan sebagai Unit dengan Kinerja Terbaik dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025.



diakui bahwa Wilayah Direktorat Jendral Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (kemudian)...

#### f) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

- Peningkatan e-office seperti SUMKER dan SIMPOS menjadikan administrasi dapat diakses lebih cepat. Aplikasi SUMKER memperludah dalam pencarian surat dan mengurangi risiko kehilangan, aplikasi SIMPOS memudahkan dalam menghirup data kepegawaian.
- Peningkatan kemampuan pegawai dalam mengelola layanan keadministratif juga dikukuhkan dalam pelatihan seperti kefarmasian.

#### g) **Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan**

Kegiatan penunjang keberhasilan Total Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Jawa Tengah yaitu berkoordinasi dengan Kantor Wilayah selaku partner di wilayah terkait informasi-informasi kepegawaian.

#### h) **Potensi Risiko dan Tingkat Pengendalian Risiko**

Terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi dan mempengaruhi pencapaian ini. Tingkat risiko tersebut masih diturunkan beberapa bentuk pengendalian sebagaimana terungkap dalam tabel berikut.

No	Potensi Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Pengendalian Risiko
1	Pergerakan lambat dan jeda yang mungkin terakumulasi.	Tinggi	Mendorong agar menggunakan komunikasi integrasi sebagai salah satu wujud atau cara khusus dan Peningkatan Integrasi
2	Kelemahan sumber dan tenaga human sumber daya yang berdampak pelayanan yang baik	Menengah	Mengembangkan Program Kerja Rencana HM yang komprehensif untuk dan meningkatkan sumber daya dan kinerja karena prestasi kinerja yang



1	Tertariknya pengakuan terhadap penglihat dan ketakutan-gali berbau jengawi	Kerabat	Menyuaran kumbesat dan kema. Basi dengan baplan kacepatan dan Kerita Wiluch tertali ketertarikan pengakuan ketakutan penglihat dan kema ngali berbau
---	--	---------	--

Sumber: Dokumen (berpener Rika Basa Pindolan dan Pindolan Negeri Jawa Tengah)



## PERENCANAAN KINERJA BARIK (REKSTRAS 2025-2026)

Capaian Proyek/lat Kinerjanya akan diukur untuk periode bulan November s.d Desember 2025.

Tabel 5. Realisasi Pekerjaan Kinerja Baru

No	Isi/uraian Kegiatan (IK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penguasaan Rancangan, Rancangan di tingkat Sekolah Menengah dan Pendidikan Hukum	Pemetaan Pelaksanaan Rancangan Ases. Formal	100%	100%	100%
		Intake kejurusan Uji Peta Tingkat Dasar Pendidikan dan Pendidikan Hukum terhadap Layanan Kejurusan lain	3,32	3,39	101,5%
2.	Meningkatnya Layanan Penerimaan Hukum di Wilayah	Tingkat Keterlambatan Layanan Penerimaan Hukum di Kantor Dinas Hukum terhadap Sektor Pendidikan	0	0%	0%
		Tingkat keterlambatan Rencana Pendidikan Hukum terhadap Penyelesaian Pendidikan Hukum & di Daerah Hukum	0	0%	0%
3.	Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Keterampilan Hukum di wilayah	Pemetaan peserta yang akan selesai terhadap total peserta yang telah hadir Keterampilan Hukum di Wilayah	50%	100%	100,0%



## SAYURAN KEGIATAN (SK) 1

### Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

IND 3.1 – Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

#### a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum	100%	100%	100%	Tercapai

Indikator ini menggambarkan keberhasilan rencana aksi reformasi birokrasi pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah.

Pada periode B12 (Triwulan IV 2025) terdapat 45 rencana aksi RB dimana realisasinya telah terlaksana dan tercatat sebagaimana telah dijabarkan oleh Inspektoral Jenderal Kementerian Hukum.

Tabel 18. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Periode B12

Periode	Total rencana RB	Realisasi RB terlaksana
Triwulan IV	45	45

Realisasi persentase pelaksanaan rencana aksi RB

$$= \frac{\text{Rencana aksi RB yang terlaksana}}{\text{total rencana aksi RB}} \times 100\%$$

$$= \frac{45}{45} \times 100\% = 100\%$$

Dari realisasi tersebut, maka capaian indikator ini juga sebesar 100%.



**b) Pertbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	2024			2025		
	TARGET	Realisasi	Capaian	TARGET	Realisasi	Capaian
Penerapan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di tingkat Desa/ Kelurahan Jawa Tengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dan capaian indikator ini telah tercapai 100% baik Tahun 2024 maupun Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Satu Indonesia dan Pelayanan Mulu Jawa Tengah konsisten dalam melaksanakan atau sebuah rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan baik.

**c) Pertbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Rencana**

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	TARGET	Realisasi	TARGET	Realisasi	TARGET	Realisasi	TARGET	Realisasi	TARGET	Realisasi
Penerapan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di tingkat Desa/ Kelurahan Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Penerapan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di tingkat Satu Indonesia dan Pelayanan Mulu Jawa Tengah: saat terungkap dalam Rencana tahun 2024 dan 2025, sehingga tabel dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada target jangka menengah Rencana.

**d) Pertbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini lokal memiliki pertbandingan standar nasional.



#### e) **Analisis Persepsi Keberhasilan**

Keberhasilan Bina Pendidikan dan Pelatihan Human Jawa Tengah dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2025 antara lain:

- Kamtibmas seluruh jajaran untuk melaksanakan rencana aksi RE.
- Melakukan perencanaan rencana aksi RD yang dilakukan sebagai tindakan agar dapat memenuhi target waktu.

#### f) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

- Dengan jumlah SDM yang terbatas, seluruh pegawai telah terpanggil sebagai Tim Kerja RD dalam memenuhi data dan anggarannya yang sesuai kea dan jajarannya masing-masing.
- Digitalisasi data dan anggarannya aplikasi ERP untuk menunjang pembantuan kerja dan penghapusan dokumen yang lebih efektif dan efisien.
- Optimalisasi website dan media sosial sebagai sarana publikasi capaian RE.

#### g) **Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan**

Kegiatan penunjang keberhasilan pada satuan koordinasi dengan Kantor Wilayah EPSCB Kabupaten, serta Biro Pemerintahan.

#### h) **Asesori Risiko dan Tindakan Pengendalian Risiko**

Terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi dan mempengaruhi pencapaian ini. Terhadap risiko tersebut telah dilakukan beberapa tindakan pengendalian sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.



No.	Adanya Risiko	Tingkat Risiko	Tindakan Pengendalian Risiko
1	Pemerintah dikecualikan karena ada link kepariwisataan	Rendah	Melakukan monitoring terkait pemerintah serta di tingkat provinsi dan
2	Dalam konteks rencana aksi yang berkaitan masih kurang memaham	Rendah	Melakukan sosialisasi terkait di level desa/kecamatan/ kabupaten/kota

Sumber: Dokumen Dokumen Risiko dan Penilaian dan Mitigasi Risiko



## IKK 1.2: Indeks Kepuasan Urut Kerja Lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Negeri terhadap Layanan Kelembagaan

### a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Pelayanan	Target	Realisasi	Capaian	Ref.
Indeks Kepuasan Urut Kerja Lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Negeri Jawa Tengah terhadap layanan kelembagaan	3,70	3,84	101,33%	Terlampaui

Sebagaimana telah dituliskan sebelumnya pada hasil pengukuran Indeks Layanan Kelembagaan, Indeks rata-rata layanan kelembagaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Negeri Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebesar 3,68.

Adapun capaian indeks kepuasan layanan kelembagaan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\
 &= \frac{3,84}{3,70} \times 100\% = 101,33\%
 \end{aligned}$$

### b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Urut Kerja Lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Negeri Jawa Tengah terhadap layanan kelembagaan	3,7	3,68	101,74%	3,70	3,84	101,33%

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi indeks kepuasan layanan kelembagaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Negeri Jawa Tengah tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Ini merupakan



bahwa kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Jawa Tengah dalam memberikan layanan karakteristik **lebih baik** dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun terdapat perubahan yang cukup signifikan antara target 2024 dengan target 2025 yang mempengaruhi perhitungan capaian K.R. Jika sebelumnya target K.R sebesar 2,1 (satu), maka pada Perjanjian Kinerja Baru 2025 target K.R berubah menjadi 2,02 (mendekati bobot/pangsa tertinggi dalam Peraturan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2030). Target ini ditetapkan berdasarkan 5000000 sebagai realisasi K.R seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2024, sehingga menjadi suatu acuan dan tantangan bagi satuan kerja untuk meningkatkan layanan keadilan keadilan di tahun berikutnya.

#### c) Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Rencana

Indikator Kinerja	2024		2025		2026		2027		2028	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kemampuan satuan kerja tingkat Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	2,1	2,02	2,02	2,02
Seluruh satuan Kementerian										

Indikator kemampuan satuan kerja tingkat Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Jawa Tengah berfungsi sebagai karakteristik baru tertinggi dalam Rencana tahun 2024 dan 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

#### d) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.



#### d) **Analisis Penyebab Keberhasilan Kegiatan**

Keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Negeri Jawa Tengah dalam melaksanakan target kinerja karena:

- Upaya dalam memberikan informasi kepegawaian seperti ujian dinas, penyusunan jadwal, insentif, sertifikasi jabatan, karier pangkat.
- Penyediaan sarpras dan fasilitas yang mendukung pekerjaan dan pelayanan publik.
- Pemantauan kegiatan dan anggaran serta pemantauan pelaksanaannya dengan rutin.
- Menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain sebagai vendor untuk pelaksanaan suatu kegiatan.
- Selain itu, sebagai Balai Pendidikan dan Pelatihan Negeri Jawa Tengah mampu memberikan layanan kesekretariatan yang baik, jasa dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.

#### e) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

- Pemanfaatan e-office seperti SUMAER dan SIMPEG menjadikan administrasi dapat berjalan lebih cepat. Aplikasi SUMAER mempermudah dalam pemrosesan surat dan mengurangi risiko kehilangan, aplikasi SIMPEG mempermudah dalam menginput data kepegawaian.
- Peningkatan kemampuan pegawai dalam mengelola layanan keadministratif juga dikuatkan dalam pelatihan seperti informasi.

#### f) **Analisis Kegiatan Penyanggah Keberhasilan**

Kegiatan penyanggah keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Negeri Jawa Tengah yaitu kolaborasi dengan Kantor Wilayah selaku partner di wilayah terkait informasi informasi kepegawaian.



#### A) Analisis Risiko dan Tingkat Pengendalian Risiko

Terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi dan mempengaruhi pencapaian ini. Terhadap risiko tersebut telah dilakukan beberapa tingkat pengendalian sebagaimana terungkap dalam tabel berikut.

No	Kategori Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Pengendalian Risiko
1	Pengadaan barang-barang yang kurang berkualitas.	Tinggi	Berkontribusi meningkatkan komitmen integritas sebagai salah satu unsur nilai-nilai Korporasi dan Pengawasan Integritas
2	Kepatuhan mitra dan pemeliharaan khusus dalam pemeliharaan penyediaan yang baik.	Berimbang	Melaksanakan Kebijakan Pemeliharaan Mitra yang telah ditetapkan dan ditinjau secara berkala oleh tim pemeliharaan mitra, secara berkala.
3	Terbatasnya pengetahuan sumber pengikat dan ketahanan pertumbuhan jaringan.	Rendah	Melakukan komunikasi dan berkolaborasi dengan mitra untuk meningkatkan kinerja WBSH terkait ketahanan pengikatan kontrak langsung dan kontrak yang berbasis.

Sumber: Dokumen perencanaan Alot Aka Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat Jember



## SAYURAN KEGIATAN (SK) 2

### Meningkatnya Layanan Pelayanan Hukum di Wilayah

(SK.2.1.: Tingkat Kepuasan Layanan Pelayanan Hukum di Balai Desa Hukum terdapat standar Pelayanan)

#### a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Kel
Tingkat Kepuasan Layanan Pelayanan Hukum di Balai Desa Hukum terdapat standar Pelayanan	1	100	100	100 Eksklusif

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan layanan pelayanan hukum di Balai Desa Hukum terdapat standar pelayanan. Realisasi kegiatan ini akan memastikan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah memberikan layanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Setelah adanya perubahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum dan Sosial Reformasi Kementerian Hukum 2025-2029, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum. Namun, dikarenakan pada saat ini pelayanan di bidang hukum pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sedang dalam tahap persiapan, maka realisasinya belum dapat diukur (00% 000/0000).



**b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	2024			2023		
	Tujuan	Realisasi	Capaian	Tujuan	Realisasi	Capaian
Tingkat Kelelahan Layanan Pelanggan Mula-mula Didatangi Mula-mula terhadap Standar Pelayanan	--	--	--	0	100	100

Tingkat Kelelahan Layanan Pelanggan Mula-mula Didatangi Mula-mula terhadap Standar Pelayanan terbung dalam Rencana Tahun 2025-2029 sesuai Peraturan No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**c) Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Rencana**

Indikator Kinerja	2025		2026		2027		2028		2029	
	Tujuan	Realisasi	Tujuan	Realisasi	Tujuan	Realisasi	Tujuan	Realisasi	Tujuan	Realisasi
Tingkat Kelelahan Layanan Pelanggan Mula-mula Didatangi Mula-mula terhadap Standar Pelayanan	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--

Tingkat Kelelahan Layanan Pelanggan Mula-mula Didatangi Mula-mula terhadap Standar Pelayanan terbung dalam Rencana Tahun 2025-2029 sesuai Peraturan No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah (Rencana).

**d) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.



e) **Analisis Penyebab Keberhasilan Kegiatan**

Saat ini penelitian di bidang hukum Tata Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sedang dalam tahap penulisan, sehingga hasilnya belum dapat diukur (not applicable).

f) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Saat ini penelitian di bidang hukum Tata Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sedang dalam tahap penulisan, sehingga hasilnya belum dapat diukur (not applicable) dan efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat diukur.

g) **Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan**

Saat ini penelitian di bidang hukum Tata Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sedang dalam tahap penulisan, sehingga hasilnya belum dapat diukur (not applicable).



## IKK 2.2 : Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Hukum Satu Diakad Hukum

### a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nil.
Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Hukum Satu Diakad Hukum	9	NA	Nil	Nil Kapasitas

Indikator tingkat kepuasan peserta pelatihan hukum terhadap penyelenggaraan pelatihan hukum Satu Diakad Hukum pada Rencana 2025-2026 akan diturunkan untuk mengukur kepuasan peserta atas penyelenggaraan pelatihan di bidang hukum. Saat ini pelatihan di bidang hukum pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sedang dalam tahap perencanaan, sehingga realisasinya belum dapat diukur (Nil 00000000).

### b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Hukum Satu Diakad Hukum	-	-	-	9	Nil	Nil

Tingkat kepuasan peserta pelatihan hukum terhadap penyelenggaraan pelatihan hukum Satu Diakad Hukum pada Rencana 2025-2026 akan diturunkan untuk mengukur kepuasan peserta atas penyelenggaraan pelatihan di bidang hukum. Saat ini pelatihan di bidang hukum pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sedang dalam tahap perencanaan, sehingga realisasinya belum dapat diukur (Nil 00000000). Sementara itu di tahun 2024, pengukuran indikator ini masih menyalang seluruh pelatihan yang ada di Balai Pendidikan



dan Kebijakan Hukum Jawa Tengah, termasuk kebijakan waru hukum. Atas dasar perbedaan pengakuan tersebut, maka realisasi dan ukuran kinerja belum ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**c) Pertbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Rencana**

Kategori Kinerja	2023		2024		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Kepuasan Pemada										
Pelayanan Hukum Berkeadilan										
Pemerataan	0	100	-	-	-	-	0	-	-	-
Pelayanan Hukum Berkeadilan										
Ukuran Kinerja										

Tingkat Kepuasan Pemada Pelayanan Hukum berdasar Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Esok Didatuk Hukum tertuang dalam Rencana Tahun 2023-2029 sesuai Peraturan No.42 Tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya pada target jangka menengah Rencana.

**d) Pertbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki pertbandingan standar nasional.

**e) Analisis Penyediaan Kebutuhan Anggaran**

Saat ini patutan di bidang hukum Esok Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sedang dalam tahap perumusan, sehingga realisasinya belum dapat diklar (NIP 4806256).

**f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Saat ini patutan di bidang hukum Esok Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sedang dalam tahap perumusan, sehingga realisasinya belum dapat diklar (NIP 4806256) dan efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat ditinjau.



#### g) Analisis Regresi Penjang Kebiasaan

Soal ini terdapat di situs portal Data Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sedang dalam tahap persetujuan, sehingga hasilnya belum dapat diukur per aplikasinya.



## SAYURAN KEGIATAN (SK) 2

### Meningkatkan Layanan Pelatihan ASN Kementerian Hukum di Wilayah

INK.1.1. : Penerapan Peserta yang Lulus Pelatihan terhadap Total Peserta Pelatihan Pelatihan ASN Kementerian Hukum di Wilayah

#### a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2005

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Persentase Peserta yang Lulus Pelatihan terhadap Total Peserta Pelatihan ASN Kementerian Hukum di Wilayah	80%	100%	100,00%	Tercapai

Indikator ini mengpresipasikan penerapan peserta pelatihan yang lebih banyak. Indikator ini diukur dengan persentase yang ditetapkan untuk dinyatakan lulus.

Dalam periode November s.d. Desember 2005, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah menyelenggarakan pelatihan dengan jumlah 250 orang dan telah selesai dinyatakan lulus.

Tabel 11. Jumlah Peserta Pelatihan ASN Kementerian di Wilayah Jawa Tengah

Periode	Waktu Pelaksanaan	Waktu	Jumlah Peserta	Lulus
Periode 1 Bulan (Gelar Pegawai Negeri Sipil)	1 Agustus – 10 November 2005	Full	100	100
Periode 3 Bulan (Kebijakan dan Daya Saing)	30 November – 3 Desember 2005	Kelompok	150	150
<b>Jumlah keseluruhan</b>			<b>250</b>	<b>250</b>



Perhitungan realisasi pemerintah provinsi yang lulus:

$$= \frac{\text{Total peserta pelatihan yang lulus}}{\text{Total peserta pelatihan}} \times 100\%$$

$$= \frac{350}{350} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, target pencapaian peserta yang lulus pelatihan terhadap total peserta pelatihan ASN Kementerian Hukum dan Wilayah telah **tercapai** dan memenuhi target yang ditetapkan.

#### a) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peserta yang Lulus Pelatihan terhadap Total Peserta Pelatihan ASN Kementerian Hukum dan Wilayah	-	-	-	97%	100%	100,00%

Persentase Peserta yang Lulus Pelatihan terhadap Total Peserta Pelatihan ASN Kementerian Hukum dan Wilayah berturut-turut dalam Rencana Tahun 2022-2023 sesuai Peraturan No.42 Tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### c) Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Rencana

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Peserta yang Lulus Pelatihan terhadap Total Peserta Pelatihan ASN Kementerian Hukum dan Wilayah	97%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-



Perencanaan Peserta yang Lulus Pelatihan terhadap Total Peserta Pelatihan ANMKementerian Hukum di Wilayah terluang dalam Rencana Tahun 2025-2029 sesuai Permenkum No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada target jangka menengah Rencana.

#### d) Perencanaan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

#### e) Analisa Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dipengaruhi oleh:

- Realisasi yang dilaksanakan merupakan pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai untuk mendukung peningkatan kinerja mereka;
- Para Widyaiswara yang dihadirkan merupakan pegawai yang kompeten dan skill di bidangnya;
- Materi dan bahan ajar yang disediakan menarik dan mudah dipahami;
- Para peserta penyempurnaan skill dalam memanfaatkan informasi dan pendampingan selama pelatihan berlangsung baik secara langsung maupun melalui whatsapp group;
- Sinergi dan kolaborasi antar instansi dengan Badan Kependidikan untuk penyempurnaan Pelatihan Wawasan Kebangsaan dan Tata Negara bagi CPNS dan PPPK;
- Pada Tahun 2025 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan dan pengembangan kompetensi dengan total output 5.092 peserta dan target 5.092 peserta.



Table 10: Daftar Pendidikan Tahun 2023

No	Pendidikan	Masa Pelaksanaan	Modul Pelaksanaan	Target	Capaian
1	Pendidikan Polytarun Pulau	8 - 11 April 2023	MOOD	115	115
2	Pendidikan Datar Pengurusan Intan Pamporan, Tembakau	21 - 25 April 2023	Klasikal	40	40
3	Pendidikan Melayakan Rujukan Urusan Sektor Rujukan	14 - 21 Mei 2023	PJJ	90	90
4	Worsnar Series "Membangun Kurang Kerja Kualifikasi Melayu from Head of The Day"	21 Mei 2023	Worsnar	300	300
5	Pendidikan Inoculsi (Keterampilan)	17 - 28 Jun 2023	PJJ	40	40
6	Pendidikan Fajar Sempang	1 - 3 Jul 2023	PJJ	40	40
7	Pendidikan Polytarun Pulau Tingkat Dasar	7 - 25 Jul 2023	MOOD	175	175
8	Pendidikan Kemandirian Persewaan Fajal Dasar	7 - 25 Jul 2023	MOOD	175	175
9	Pendidikan KEMERKATAHAN	7 - 25 Jul 2023	MOOD	175	175
10	Worsnar Series "Membangun Melayu Pengambilan Kemandirian"	12 Agustus 2023	Worsnar	1000	1000
11	Pendidikan Protorok	11 - 15 September 2023	Senarai Learning	40	40
12	MOOD MPA	17 - 21 Oktober 2023	MOOD	175	175
13	Worsnar Series "Sudaya Kemi Adurai, Menyajikan Kemandirian"	18 November 2023	Worsnar	1000	1000
14	Pendidikan Dasar CPNS Anggutan K.L.S. IV	5 Agustus - 18 November 2023	PJJ	88	88
15	Pendidikan Wawasan Kemungkinan dan Kemi Negara bagi CPNS dan PPPK	30 November - 5 Desember 2023	Klasikal	107	107
<b>Total Output</b>				<b>4,348</b>	<b>4,348</b>

#### f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dejaga jumlah SDM yang terlibat yakni 20 pegawai, Baita Pendidikan dan Pendidikan Pulau Jawa Tengah telah memetakan keperluan sebagai jumlah dan pegawai sesuai kegunaannya. Selain itu, pegawai telah bekerja sama dalam hal pelaksanaan pembelajaran, penemuan peserta secara daring maupun luring hingga penyediaan semua prosedur yang dibutuhkan.



- Dalam hal keterbatasan jumlah Widjayanti, Sala Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah mengundang para pengajar dari DP3DM Hukam, Unit Pusat, Kantor Wilayah maupun dari instansi lain yang kapabel dan relevan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.
- Debuabngan dengan adanya kabijakan dibidang anggaran, pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan dengan metode distance learning sesuai Keputusan Kepala LAN Nomor 301/K.L/DP/2020/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Dalam Pajawani Aagan Sipil.

#### g) Analisis Kapasitas Penunjang Keberhasilan

Kegiatan utama yang keberhasilannya Sala Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yaitu:

- adanya koordinasi dengan DP3DM Hukam dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan,
- perilaku esensial dalam menanggapi pertanyaan maupun kritikan yang dihadapi peserta.

#### A) Potensi Risiko dan Tingkat Pengendalian Risiko

Terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi dan mempengaruhi pencapaian ini. Terhadap risiko tersebut telah dilakukan beberapa tingkat pengendalian sebagai mana terdapat dalam tabel berikut.

No	Potensi Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Pengendalian Risiko
1	Peserta Pelatihan memusatkan tekadannya untuk menanggapi hal tersebut yang diabaikan.	Tinggi	- Melakukan sosialisasi-bekas-bekas tentang Pajawani ini baik dari kementerian maupun unit penyangga dan penyalur ketika pengamatan program pelatihan. - Memastikan terdapat tim yang profesional ketika tenaga pengajar pengajar.



			<p>institusi sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.</p>
2	Pembinaan nilai keagamaan sebagai pedoman hidup masyarakat	Thrup	<p>Melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan formal dan nonformal pengkaderan sesuai dengan arahan dan kebijakan yang berlaku.</p>
3	Tetapnya penyelenggaraan kerja oleh ASN/pejabat	Thrup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjalankan kewajiban sebagai pejabat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN/pejabat.</li> <li>- Menjalankan kewajiban sebagai pejabat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN/pejabat.</li> </ul>
4	Widyawan yang ditunjuk untuk melakukan penelitian tanpa terikat secara administratif dengan lembaga	Kelemb	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan studi dan penelitian di Widyawan.</li> <li>- Mengembangkan hasil penelitian studi dan penelitian ke dalam karya tulis ilmiah.</li> </ul>
5	Kemampuan anggaran dalam penyelenggaraan penelitian dasar	Kelemb	<p>Mengelola pelaksanaan anggaran penelitian dengan mematuhi prinsip akuntabilitas dan efisiensi.</p>
6	Kemampuan pelaksanaan penelitian dasar	Kelemb	<p>Melaksanakan etika penyelenggaraan penelitian dan mendapatkan hasil berupa publikasi ilmiah sebagai sarana pemertayaan <b>self development</b> bagi dosen dan mahasiswa.</p>
7	Kemampuan pengantar studi kefarmasian atau kesehatan	Kelemb	<p>Melakukan rapat internal terkait penyusunan rencana kegiatan serta melakukan penyusunan hasil dan rencana kegiatan dan anggaran sesuai dengan DIPA.</p>

Sumber: Dokumen Manajemen RENCANA BANGUNAN dan Penelitian Hukum Jawa Tengah



## B. Revisi Anggaran

**P**erinci detail realisasi anggaran per tanggal 31 Oktober 2025 (jurnal Perjanjian Kinerja Lama) dan per tanggal 31 Desember 2025 (jurnal Perjanjian Kinerja Baru).

Rada Perjanjian Kinerja Lama ditetapkan pada anggaran sebesar Rp 26.308.573.000. Namun sebesar sejumlah dana yang tidak dapat dicairkan (tidak) akibat ketidakpastian penyelesaian tenaga negara (efisiensi) sebesar Rp 16.553.382.000 yang meliputi akan Telle (a) Barang sebesar Rp 11.861.385.000 dan Bahan & Material sebesar Rp 4.589.000.000 sehingga jumlah pagu yang tersedia dan dapat dipergunakan adalah sebesar Rp 9.755.190.000. Dari nilai pagu efisiensi tersebut telah direalisasi sebesar Rp 6.172.527.247 atau 70,50% selama periode Januari hingga Oktober 2025 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 11. Realisasi Anggaran per Tanggal 31 Oktober 2025

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Nilai	Desain
Pagu Non Efisiensi	20.308.573.000	6.815.103.000	13.490.468.000	33,54%
Pagu Efisiensi	6.708.100.000	6.815.103.000	6.836.021.000	77,09%

Kategori	Pagu Non Efisiensi			Pagu Efisiensi		
	Tipe	Realisasi	Desain	Tipe	Realisasi	Desain
Layanan Logistik dan Logistik Internal	2.444.021.000	4.311.233.000	75,27%	6.032.941.000	4.311.233.000	71,46%
Layanan Operasi dan Pemeliharaan	4.261.000.000	61.700.000	1,4%	294.000.000	61.700.000	20,97%
Layanan Manajemen SDM Internal	11.031.132.000	1.467.044.000	13,27%	1.389.281.000	1.467.044.000	10,54%
Layanan Manajemen Keuangan	983.420.000	643.133.000	65,40%	250.900.000	643.133.000	25,63%
<b>Jumlah</b>	<b>26.308.573.000</b>	<b>6.815.103.000</b>	<b>25,91%</b>	<b>6.756.180.000</b>	<b>6.815.103.000</b>	<b>77,09%</b>



Jenis Pajak	Pajak Penghasilan			Pajak Lain-lain		
	Pajak	Retensi	Capaian	Pajak	Retensi	Capaian
Beban Pajak	1.254.300.000	1.071.144.051	85,21%	1.199.211.000	1.051.144.001	88,07%
Beban Daerah	1041.100.000	894.004.151	85,79%	991.400.000	849.004.211	84,63%
Beban Pusat	4.500.000.000	287.100.000	6,37%	204.000.000	202.100.000	99,07%
<b>Jumlah</b>	<b>6.354.300.000</b>	<b>4.452.344.051</b>	<b>71,64%</b>	<b>3.394.611.000</b>	<b>3.052.244.001</b>	<b>89,93%</b>

Fakta Pekerjaan Karya Kawan Anggaran Rata Perhitungan dan Pelatihan Hukun Jawa Tengah masih dengan pagu yang sama yaitu sebesar 25.305.571.000. Dari pagu tersebut terdapat dana yang tidak dapat diokupasi (100%) akibat kebijakan penyediaan belanja negara (efisien) sebesar Rp. 10.694.050.000 yang terbagi oleh Belanja Barang sebesar Rp 11.100.000.000 dan Belanja Modal sebesar Rp 4.500.000.000. Penurunan pagu tidak dari periode sebelumnya dikarenakan adanya realokasi anggaran sebesar Rp 609.327.000 yang dialokasikan untuk Pelatihan Dasar CPNS dan Pelatihan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara sehingga jumlah pagu yang tersedia dan dapat dipergunakan mencapai Rp 9.614.817.000. Dari nilai pagu tersebut tersebut lebih optimal sebesar Rp 9.614.817.000 atau 68,40% selama periode Januari hingga Desember 2020 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 04. Realisasi Anggaran per Tanggal 31 Desember 2020

Jenis	Pagu Anggaran	Realisasi	Abs	Capaian
Pagu Belanja	25.305.571.000	9.614.817.000	16.747.271.700	38,38%
Pagu Pegawai	9.614.817.000	9.614.817.000	0,000.000	100,00%



Rekening	Tiga Bulan Berakhir			Tiga Bulan Berakhir		
	Piutang	Penjualan	Biaya	Piutang	Penjualan	Biaya
Layanan Jasa Manajemen Investasi	6.232.331.000	2.207.000.000	33,82%	6.032.767.000	2.202.000.000	36,32%
Layanan Jasa Perencanaan Investasi	4.283.000.000	207.700.000	4,85%	294.000.000	207.700.000	70,57%
Layanan Manajemen Dana Investasi	13.270.000.000	2.750.000.000	20,73%	2.750.000.000	2.750.000.000	100,00%
Layanan Manajemen Reputasi Investasi	203.000.000	222.700.000	109,70%	222.700.000	222.700.000	100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>24.088.331.000</b>	<b>5.387.400.000</b>	<b>22,36%</b>	<b>11.303.467.000</b>	<b>5.382.400.000</b>	<b>47,59%</b>

Jenis Biaya	Tiga Bulan Berakhir			Tiga Bulan Berakhir		
	Piutang	Penjualan	Biaya	Piutang	Penjualan	Biaya
Biaya Gaji	1.750.000.000	1.750.000.000	100,00%	1.750.000.000	1.750.000.000	100,00%
Biaya Sewa	10.000.000.000	1.000.000.000	10,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	10,00%
Biaya Listrik	4.000.000.000	200.000.000	5,00%	200.000.000	200.000.000	50,00%
<b>Jumlah</b>	<b>9.750.000.000</b>	<b>2.950.000.000</b>	<b>30,36%</b>	<b>2.950.000.000</b>	<b>2.950.000.000</b>	<b>100,00%</b>



## Perbandingan Realisasi Capaian Keuangan

Berikut perbandingan capaian keuangan Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 15. Perbandingan Capaian Keuangan Tahun 2024 dan 2023

Jenis Biaya	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Biaya Pegawai	1.553.074.000	1.535.033.722	98,41%	1.700.701.000	1.703.755.811	99,89%
Biaya Katering	10.713.031.000	10.546.486.038	98,37%	7.200.790.000	7.005.754.500	97,29%
Biaya Mula	914.031.000	899.273.000	98,27%	298.200.000	291.700.000	97,82%
<b>Jumlah</b>	<b>12.180.136.000</b>	<b>11.980.792.760</b>	<b>98,35%</b>	<b>9.201.691.000</b>	<b>9.001.206.311</b>	<b>97,82%</b>

Tabel 16. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2024 dan 2023



Terlihat di atas diketahui bahwa:

- Pagu dan realisasi anggaran tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2023 dikarenakan adanya anggaran pelaksanaan Kebijakan Dasar CPNS antara DB/DBD (Mula dan PA) sehingga realisasi anggarannya pun cukup besar.



- Populasi anggaran Belanja Pegawai tahun 2025 lebih besar dibandingkan tahun 2024 dikarenakan adanya insentif gaji dan tunjangan PPPK pada Elemen Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah.
- Populasi anggaran Belanja Barang tahun 2025 lebih kecil dibandingkan tahun 2024 dikarenakan penyisihan anggaran Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2025 dilakukan secara Pembekalan Jarak Jauh (PJJ), begitu juga dengan pelatihan lainnya didominasi oleh metode PJJ sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut relatif lebih kecil.
- Populasi anggaran Belanja Modal tahun 2025 lebih kecil dibandingkan tahun 2024 dikarenakan anggaran yang tersedia hanya untuk belanja pemeliharaan fasilitas perkantoran.
- Capaian realisasi anggaran Tahun 2025 meningkat dibandingkan Tahun 2024 dikarenakan anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan dengan optimal.



## C. Capaian Kinerja Anggaran

### 1) SMART DJA

Dalam rangka penetapan penganggaran berbasis kinerja dan memutarbelok sebagian korp dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah menerapkan capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA dengan hasil sebagai berikut:

Rumahnya SMART DJA



Mula kinerja anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah pada aplikasi SMART DJA sebesar **87.10** dengan kategori "Sangat Baik" yang merupakan kategori dari nilai perencanaan anggaran dan nilai pelaksanaan anggaran. Adapun perbandingan kedua nilai tersebut sebagai berikut:

- Nilai perencanaan anggaran sebesar 98.25
- Nilai pelaksanaan anggaran sebesar 88.00



## 2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (JKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dari sisi pelaksanaan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil anggaran dengan tetap memperhatikan kasubudhi terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan JKPA, yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mantapnya manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Saat Pendidikan dan Pelatihan Hakim Juri Tingkat Rendah nilai JKPA Tahun 2025 sebesar **58,80** dengan komponen sebagai berikut:

Gambar 4. JKPA

No	Uraian	Kategori	Nilai	Kategori						Nilai	Kategori	Nilai
				1	2	3	4	5	6			
1	Rapel DP4 dengan nilai 80		80									
2	Deviasi Pelaksanaan BUDPA dengan nilai 100		100									
3	Penyempitan Anggaran dengan nilai 100		100									
4	Belanja Konstruktif dengan nilai 100		100									
5	Penyediaan Tagihan dengan nilai 100		100									
6	Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 100		100									
7	Dasar output dengan nilai 100		100									
	<b>Jumlah</b>		<b>580</b>									

- Rapel DP4 dengan nilai 80
- Deviasi Pelaksanaan BUDPA dengan nilai 100
- Penyempitan Anggaran dengan nilai 100
- Belanja Konstruktif dengan nilai 100
- Penyediaan Tagihan dengan nilai 100
- Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 100
- Dasar output dengan nilai 100



## D. Capaian Kinerja Lainnya

### 1) E-Performanso KANTORAL HUKUM

Selain E-Perkonomo hanya memuat asosiasi dan indikator kegiatan pada Perjanjian Kinerja Lintas, Adapun capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah pada e-Performanso pada seluruh indikator telah tercapai 100%.

Sumber 6. E-Performanso



### 2) E-Money Response

Selanjut dengan laporan ini disusun laporan pada e-Money Response baru bisa dijadi hingga periode Desember 2025 dengan persentase keterlaksanaan pelayanan 100%.

Sumber 7. E-Money Response





### 3) Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja

Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PMPD atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Hukum, telah disusun rencana aksi percepatan Perjanjian Kinerja sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Rencana aksi tersebut diinput dalam portal e-Performance Kementerian. Jumlah rencana aksi yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sebanyak 42 dan seluruh rencana aksi tersebut telah terpenuhi.

Tabel 7. Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja

No	Kategori	Materi	Status	Tanggal
1	Aksi		1	1
2	Koordinasi		1	1
Total			1	1

Tabel 8. Rencana Aksi PA yang Telah Dipenuhi

Periode	Jumlah Rencana Telah Lulus	Jumlah RTL yang Telah Dipenuhi
2018	1	1
2019	12	12
2020	6	6
2021	21	21
Total	42	42



Gambar 1. Penjadwalan pelajaran (ajar) di pokok-pokok bahasan

NO	KELOMPOK	NO	KELOMPOK	NO	KELOMPOK	NO	KELOMPOK
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100

A stack of several books is positioned on a wooden surface. On top of the stack sits a small green plant in a white pot. The background is a blurred bookshelf filled with books. A semi-transparent grey box is overlaid on the middle of the image, containing the text 'BAB IV' and 'PENUTUP' in bold black letters.

**BAB IV**  
**PENUTUP**



## A. Simpulan

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah secara umum dapat melaksanakan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, baik Perjanjian Kinerja Lama maupun Perjanjian Kinerja Baru.

Dari ketiga indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Lama semuanya telah mencapai target. Sementara itu, dari kelima indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Baru, 3 (tiga) indikator telah mencapai bahkan melebihi target sementara 2 (dua) indikator pada sebagian kegiatan. Mengingat adanya Layanan Pendidikan ASPI Kementerian Hukum & Wilayah belum dapat diukur dan diukurkan (Not Applicable) karena saat ini pelatihan di bidang hukum pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sedang dalam tahap persiapan.

Sementara itu dari sisi anggaran, pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah pada Tahun 2020 sebesar Rp 26.388.576.000. Dari nilai tersebut terdapat dana yang tidak dapat diamban (Mblaku) sebesar kelebihan penyusutan biaya repairs (efisiensi) sebesar Rp 15.694.058.000 sehingga jumlah pagu yang tersedia dan dapat dipergunakan adalah Rp 9.694.517.000. Dari nilai pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp 5.667.300.255 atau 58,45%. Ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah optimal mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, dapat kami sampaikan saran sebagai berikut:

1. Menjadikan evaluasi capaian kinerja tahun ini sebagai bahan penyusunan strategi mencapai kinerja yang lebih baik.



1. Menegakkan koordinasi dengan SP3OM Hukum dalam rangka pelaksanaan penelitian di bidang hukum untuk mencapai sasaran Meningkatkan Layanan Pelayanan ASN Kementerian Hukum di Wilayah;
2. Menyusun strategi dalam mengelola kebijakan pelaksanaan anggaran sehingga kegiatan tidak berhenti dan mencapai anggaran tidak optimal.



**LAMPIRAN**





Example: A firm's production process with two inputs and one output



Wiederholung: Lösung der Aufgabe 1 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)

**Table 1: Summary of Results**

Problem	Result	Method	Notes
(a)	...	...	...
(b)	...	...	...
(c)	...	...	...
(d)	...	...	...
(e)	...	...	...
(f)	...	...	...
(g)	...	...	...
(h)	...	...	...
(i)	...	...	...
(j)	...	...	...
(k)	...	...	...
(l)	...	...	...
(m)	...	...	...
(n)	...	...	...
(o)	...	...	...
(p)	...	...	...
(q)	...	...	...
(r)	...	...	...
(s)	...	...	...
(t)	...	...	...
(u)	...	...	...
(v)	...	...	...
(w)	...	...	...
(x)	...	...	...
(y)	...	...	...
(z)	...	...	...



Lampiran 2. Hasil Survei Persepsi Ahli Komunikasi dan Survei Persepsi Komunitas  
 Pelayaran pada aplikasi SMS BSK Keluar

<p>Jember</p>	<p>Jekson</p>	<p>New</p>
<p>April</p>	<p>Maj</p>	<p>Juli</p>
<p>Agil</p>	<p>Agustus</p>	<p>September</p>
<p>Desember</p>	<p>November</p>	<p>Desember</p>



Lampiran 2. Dokumentasi Kelembagaan dan Keagamaan



Konvensi dengan Rindom  
S/Dialokan



Konvensi dengan Pemerintah Provinsi  
DI



Konvensi dengan Pemerintah Provinsi  
Jawa Tengah



Konvensi dengan Pemerintah Provinsi  
DI Propokarta



Lampiran 7. Papan Penghargaan sebagai Afiliasi Terbaik dalam Capaian RKA  
Semester I Tahun 2025

